

LSM: Ekonomi Hijau Belum Selamatkan Lingkungan

Pada saat Pemerintah Indonesia mengampanyekan penerapan pembangunan berbasis *Blue Economy* atau Ekonomi Biru sebagai bagian integral Ekonomi Hijau, suara protes muncul dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LMS) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF).

CSF mengkritik pertemuan KTT Rio+20 karena dinilai tidak menjawab masalah utama kerusakan bumi. Tetapi, justru melanggengkan sistem ekonomi neoliberal dengan sekadar menempelkan kata hijau tanpa mengubah orientasi pembangunan yang eksploitatif.

Koordinator CSF Siti Maimunah menuding Ekonomi Hijau yang dikampanyekan peserta KTT justru mendorong perluasan privatisasi, komodifikasi, dan finansialisasi sumber daya alam, merampas sumber-sumber kehidupan rakyat, memperkuat penindasan terhadap perempuan, serta menghancurkan keragaman hayati, termasuk perdagangan karbon, tukar guling kawasan (*biodiversity offset*) yang mengemuka dalam perundingan-perundingan

global. "Hal itu akan mengulang kegagalan deklarasi pembangunan berkelanjutan yang justru memperluas kerusakan lingkungan, percepatan pemanasan global, dan membahayakan keselamatan penghuni bumi," katanya dalam rilis kepada *Republika*.

Menurutnya, nelayan, petani, masyarakat adat, buruh, kaum miskin kota, perempuan, pemuda, dan anak-anak mengalami dan menjadi saksi menurunnya keselamatan rakyat dan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu. Sementara, hasil-hasil perundingan internasional perubahan iklim dinilai tidak menggembirakan karena selalu menghasilkan dokumen perundingan tanpa kewajiban menurunkan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara industri.

CSF menyerukan komitmen peserta KTT Rio+20 agar sungguh-sungguh memikirkan nasib penghuni bumi dan menghasilkan tindakan nyata bagi pemulihan sumber-sumber kehidupan yang lebih adil dan berkualitas. Ada lima tuntutan CSF, yaitu: pertama, menuntut perubahan orientasi pembangunan yang memastikan pemajuan,

perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia, dan hak asasi perempuan.

Kedua, menolak Ekonomi Hijau yang dibangun dalam kerangka sistem ekonomi neoliberal dan akan mendorong perluasan privatisasi, komodifikasi, dan finansialisasi sumber daya alam yang merampas sumber-sumber kehidupan rakyat, serta menghancurkan keragaman hayati dengan skema dan pertambangan apa pun.

Ketiga, mendesak pemerintah konsisten menjalankan Agenda 21 berdasarkan prinsip-prinsip Deklarasi Rio. Keempat, mendesak pemerintah tidak bekerja sama dengan perusahaan perusak lingkungan, pelanggar HAM, serta lembaga keuangan internasional untuk pendanaan negosiasi dan pencitraan yang mengatasnamakan keberlanjutan ekosistem, pelestarian lingkungan, dan pengentasan kemiskinan.

Kelima, mendesak pejabat negara merealisasikan komitmen pembentukan konvensi mengenai prinsip 10, prinsip 20, prinsip 22 Deklarasi Rio, dan mendorong implementasi Pasal 65 ayat (2) UU No 32/2009. ■ zaky al hamzah